



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA



MAYJEN TNI (PURN)
YULIUS SELVANUS, SE
GUBERNUR

DR. J. VICTOR
MAILANGKAY, SH, MH
WAKIL GUBERNUR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH



VISI :

MENUJU SULAWESI UTARA MAJU SEJAHTERA,
DAN BERKELANJUTAN

MISI :

1. Mencegah dan memberantas KKN serta Narkoba
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Membangun Perekonomian Daerah
4. Memperkuat Daya Saing Daerah dan International
5. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Yang Merata dan Berkelanjutan
6. Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Nyaman Dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Yang Berkearifan Lokal
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
8. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029. Selain itu, dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan lembaga pusat, usulan program dan kegiatan juga disampaikan oleh bidang-bidang teknis dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026.

Manado, Oktober 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian
Renstra PD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 19

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 36

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

BAB V PENUTUP 41

Tabel Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2026 (TC.33) 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan tahun berjalan. Penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Rencana Strategi Perangkat Daerah 5 Tahun berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini, memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan Perangkat Daerah, karena Rencana Kerja ini merupakan produk perencanaan pada instansi ini. Kualitas penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dimulai dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam rencana kerja ini didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

- daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 - d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana kerja ini didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
 - e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja-PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra-PD, dan RPJMD, bagi RKA-PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Berikut ini disajikan Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

Persiapan	Penyusunan Renja	Forum OPD	Tahapan Penetapan Renja
Pembentukan SK	Penyusunan RENJA Disnakertrans Prov. Sulut mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Sulut Tahun 2026 dan Renstra Disnakertrans Prov. Sulut 2025-2029	Penyelarasan Program/Kegiatan	Penyempurnaan Renja Verifikasi Renja Oleh Bappeda Prov. Sulut
Orientasi mengenai Renja Disnakertrans Prov.Sulut	Evaluasi Program dan Kegiatan	Penajaman Indikator dan Target Kinerja Penyelarasan Program / Kegiatan antar PD	Pengesahan Rancangan RKPD oleh Gubernur Sulawesi Utara
Penyusunan Agenda	Identifikasi Masalah dan Pemecahan masalah		Penetapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
Pengumpulan Data dan Informasi	Usulan Program/Kegiatan	Penyesuaian Pendanaan Program dan Kegiatan	

Tabel 1.1. Rencana Tahapan Penyusunan Renja-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; dan
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai bahan perumusan program dan kegiatan dan/atau rencana kerja Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2026. Selanjutnya tujuan dari Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai bahan usulan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang dituangkan melalui Program dan Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan serta untuk mendapatkan dukungan melalui APBD.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 terkait dengan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan terdiri dari (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, (3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, (4) Program Penempatan Tenaga Kerja, (5) Program Hubungan Industrial, dan (6) Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

a. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terealisasi sebanyak 113 orang;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, terealisasi sesuai target sebanyak 150 dokumen;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, terealisasi sesuai target sebanyak 36 dokumen;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, terealisasi sesuai target sebanyak 4 laporan; dan
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, terealisasi sesuai target sebanyak 36 laporan.
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, terealisasi sesuai target sebanyak 6 laporan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, terealisasi sebanyak 46 paket dari target renstra sebanyak 113 paket karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada; dan
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, terealisasi sebanyak 25 orang dari target renstra sebanyak 113 orang karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sesuai target sebanyak 10 paket; dan
 - b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sesuai target sebanyak 6 laporan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terealisasi sesuai target sebanyak 50 unit.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sesuai target sebanyak 36 laporan; dan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terealisasi sesuai target sebanyak 36 laporan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, terealisasi sesuai target sebanyak 1 unit;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terealisasi sesuai target sebanyak 5 unit;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terealisasi sesuai target sebanyak 60 unit; dan
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terealisasi sesuai target sebanyak 4 bangunan.
8. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terealisasi sesuai target yaitu 3 Dokumen; dan
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, terealisasi sesuai target renstra yaitu 1 Dokumen.

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), melalui sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, terealisasi hanya sebanyak 3 dokumen atau tidak sesuai dengan target renstra yaitu 8 Dokumen dikarenakan beberapa Kabupaten/Kota belum menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, melalui sub kegiatan :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, terealisasi 48 Orang dibanding target renstra sebanyak 666 orang dikarenakan oleh keterbatasan anggaran pelatihan.

2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, melalui sub kegiatan :
 - a) Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja, terealisasi sesuai target renstra sebanyak 10 LPK.
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja**
 1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, melalui sub kegiatan :
 - a) Job Fair/Bursa Kerja, terealisasi sesuai target renstra yaitu 650 orang.
- e. Program Hubungan Industrial**
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), melalui sub kegiatan:
 - a) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), terealisasi sesuai target renstra yaitu 1 Keputusan Gubernur;
 - b) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, terealisasi sebesar 598.272 peserta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibanding dengan target renstra sebesar 602.445 peserta.
- f. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, terealisasi 96,16% atau 3316 Perusahaan dari target renstra sebanyak 3450 perusahaan dikarenakan kurangnya perusahaan yang mendaftar pada aplikasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online serta target renstra terlalu tinggi;
 - b) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, terealisasi 98,80% atau sebanyak 247 perusahaan dari target dari renstra sebesar 250 perusahaan.

URUSAN PILIHAN

Program Kegiatan Urusan Pilihan Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yakni Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi :

a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, melalui kegiatan :
 - a) Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman, terealisasi sebanyak 120 Kepala Keluarga karena menyesuaikan jumlah Kepala Keluarga yang mengikuti pelatihan dilokasi transmigrasi.

Capaian kinerja PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENJA Tahun 2024 semuanya telah memenuhi target dan selesai sesuai waktu pelaksanaan kegiatan.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024		Unit PD Penanggung jawab
1	1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
	2	Urusan Wajib		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	2.07	Ketenagakerjaan																
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96	% 17.575.653.408	95	% 14.853.414.369	95	% 17.235.857.416	95	% 15.136.353.744	100,00%	87,82%	190	% 29.989.768.113	198%	171%	
	2.07.01.1.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara	96	% 16.366.610.000	95	% 12.530.385.317	95	% 14.663.385.321	95	% 13.208.737.446	100,00%	90,08%	190	% 25.739.122.763	198%	157%	
	2.07.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	113	Orang 15.911.000.000	113	Orang 11.900.282.826	113	Orang 13.554.801.491	113	Orang 12.721.739.753	100,00%	93,85%	226	Orang 24.622.022.579	200%	155%	Disnaker
	2.07.01.1.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150	Dokumen 40.000.000	150	Dokumen 569.046.666	150	Dokumen 1.063.162.548	150	Dokumen 441.661.943	100,00%	41,54%	300	bulan 1.010.708.609	200%	2527%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	Dokumen 345.000.000	36	Dokumen 19.852.110	36	Dokumen 18.192.682	36	Dokumen 18.177.950	100,00%	99,92%	72	bulan 38.030.060	200%	11%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan 35.000.000	4	Laporan 9.542.400	4	Laporan 7.922.100	4	Laporan 7.863.900	100,00%	99,27%	8	bulan 17.406.300	200%	50%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	36	Laporan 35.610.000	36	Laporan 31.661.315	36	Laporan 19.306.500	36	Laporan 19.293.900	100,00%	99,93%	72	bulan 50.955.215	200%	143%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.03	2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tercatat	100	% 49.653.408	100	% 46.285.458	100	% 10.138.600	100	% 10.105.900	100,00%	99,68%	200	% 56.391.358	200%	114%	
	2.07.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan 49.653.408	6	Laporan 46.285.458	6	Laporan 10.138.600	6	Laporan 10.105.900	100,00%	99,68%	12	bulan 56.391.358	200%	114%	UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi	100	% 125.000.000	100	% 72.342.310	100	% 38.761.900	100	% 37.372.500	100,00%	96,42%	200	% 109.714.810	200%	88%	
	2.07.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	113	Paket 95.000.000	37	Paket 62.440.000	113	Paket 38.250.000	46	Paket 37.040.000	40,71%	96,84%	83	Pasang 99.480.000	73%	105%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	113	Orang 30.000.000	0	Orang 9.902.310	113	Orang 511.900	25	Orang 332.500	22,12%	64,95%	25	Orang 10.234.810	22%	34%	Disnaker
	2.07.01.1.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang	100	% 255.000.000	96	% 450.129.746	97	% 321.722.700	97	% 321.433.182	100,00%	99,91%	193	% 771.562.928	193%	303%	
	2.07.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket 120.000.000	10	Paket 211.996.178	10	Paket 88.902.800	10	Paket 88.782.200	100,00%	99,86%	20	bulan 300.778.378	200%	251%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai
	2.07.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan 135.000.000	6	laporan 238.133.568	6	laporan 232.819.900	6	laporan 232.650.982	100,00%	99,93%	12	bulan 470.784.550	200%	349%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK

1	1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2.07.01.1.07	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	100 %	50.000.000	100 %	283.713.989	100 %	98.865.146	100 %	96.502.999	100,00%	97,61%	200 %	380.216.988	200%	760%	
	2.07.01.1.07.06	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	50.000.000	50 unit	283.713.989	50 unit	98.865.146	50 unit	96.502.999	100,00%	97,61%	100 unit	380.216.988	200%	760%	Disnaker
	2.07.01.1.08	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	99 %	256.000.000	96 %	609.715.541	97 %	1.751.784.432	97 %	1.117.491.486	100,00%	63,79%	193 %	1.727.207.027	195%	675%	
	2.07.01.1.08.02	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lapora n	46.000.000	36 Laporan	238.708.939	36 Laporan	260.400.000	36 Lapora n	247.929.464	100,00%	95,21%	72 bulan	486.638.403	200%	1058%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.08.04	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Lapora n	210.000.000	36 Laporan	371.006.602	36 Laporan	1.491.384.432	36 Lapora n	869.562.022	100,00%	58,31%	72 bulan	1.240.568.624	200%	591%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK,
	2.07.01.1.09	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	100 %	418.390.000	97 %	836.113.603	98 %	345.376.917	98 %	338.887.831	100,00%	98,12%	195 %	1.175.001.434	195%	281%	
	2.07.01.1.09.01	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	175.000.000	1 unit	71.541.460	1 unit	60.260.656	1 unit	55.695.100	100,00%	92,42%	2 Bulan	127.236.560	200%	73%	Disnaker
	2.07.01.1.09.02	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	43.390.000	5 unit	200.301.400	5 unit	191.381.461	5 unit	189.769.431	100,00%	99,16%	10 Bulan	390.070.831	200%	899%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.09.06	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	75.000.000	60 unit	71.494.500	60 unit	29.000.000	60 unit	29.000.000	100,00%	100,00%	120 Bulan	100.494.500	200%	134%	Disnaker, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.09.09	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 bangun an	125.000.000	4 bangun an	492.776.243	4 bangun an	64.734.800	4 bangun an	64.423.300	100,00%	99,52%	8 Bulan	557.199.543	200%	446%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK,
	2.07.01.1.01	8	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	55.000.000	100 %	24.728.405	100 %	5.822.400	100 %	5.822.400	100,00%	100,00%	200 %	30.550.805	200%	56%	
	2.07.01.1.01.01	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokum en	40.000.000	3 dokume n	9.368.305	3 dokume n	5.303.900	3 dokum en	5.303.900	100,00%	100,00%	6 dokum en	14.672.205	200%	37%	Disnaker
	2.07.01.1.01.02	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokum en	15.000.000	1 dokume n	15.360.100	1 dokume n	518.500	1 dokum en	518.500	100,00%	100,00%	2 dokum en	15.878.600	200%	106%	Disnaker
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	80 %	40.943.623	46 %	164.778.010	53 %	83.211.000	20 %	82.901.920	37,74%	99,63%	66 %	247.679.930	83%	605%		
	2.07.02.1.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	13 Doku men	40.943.623	8 Dokum en	164.778.010	9 Dokum en	83.211.000	9 Doku men	82.901.920	100,00%	99,63%	17 Doku men	247.679.930	131%	605%	
	2.07.02.1.01.01	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	12 Dokum en	40.943.623	7 dokume n	164.778.010	8 Dokum en	83.211.000	3 Dokum en	82.901.920	37,50%	99,63%	10 dokum en	247.679.930	83%	605%	Disnaker
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	64 %	96.097.352	61 %	100.205.700	62 %	150.000.000	62 %	141.613.300	100,00%	94,41%	123 %	241.819.000	192%	252%		
	2.07.04.1.03	1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	1090 lowon gan	96.097.352	1025 lowon gan	100.205.700	1050 lowon gan	150.000.000	3.037 lowon gan	141.613.300	289,24%	94,41%	4.062 lowon gan	241.819.000	373%	252%	
	2.07.04.1.03.03	-	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	700 orang	96.097.352	625 orang	100.205.700	650 orang	150.000.000	650 orang	141.613.300	100,00%	94,41%	1.275 orang	241.819.000	182%	252%	Disnaker

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Adapun analisis capaian kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian PD yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja	7 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	
		-	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	20 perusahaan	30 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	
2	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2025	656 orang	666 orang	678 orang	700 orang	582 orang	48 orang	678 orang	700 orang	
3	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	
4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	625 Orang	650 Orang	675 Orang	700 Orang	625 Orang	650 Orang	675 Orang	700 Orang	
6	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI	-	-	2500 Orang	2600 Orang	-	Orang	2500 Orang	2600 Orang	
7	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	130 perkara	130 perkara	130 perkara	130 perkara	37 perkara	perkara	130 perkara	130 perkara	
		-	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	14050 orang	14100 orang	14150 orang	14200 orang	14050 orang	orang	14150 orang	14200 orang	
		-	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	590 Perusahaan	615 Perusahaan	645 Perusahaan	675 Perusahaan	590 Perusahaan	Perusahaan	645 Perusahaan	675 Perusahaan	
8	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	Jumlah Penetapan UMP	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	
		-	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	601.381 orang	602.445 orang	603.534 orang	605.325 orang	608.135 orang	598.272 orang	603.534 orang	605.325 orang	
9	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	697 Perusahaan	715 Perusahaan	765 Perusahaan	798 Perusahaan	697 Perusahaan	Perusahaan	765 Perusahaan	798 Perusahaan	
		-	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online	103 Perusahaan	156 Perusahaan	189 Perusahaan	195 Perusahaan	103 Perusahaan	Perusahaan	189 Perusahaan	195 Perusahaan	
		-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Biprit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
10	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	3300 Perusahaan	3450 perusahaan	3600 perusahaan	3750 perusahaan	1549 Perusahaan	3316 Perusahaan	3600 perusahaan	3750 perusahaan	
		-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	100% 220	100% 250	100% 300	100% 350	100% 220	100% 247	100% 300	100% 350	
		-	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	
11	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
		-	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
12	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	-	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	225 KK	270 KK	315 KK	360 KK	120 KK	0 KK	315 KK	360 KK	
13	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang)	534 sertifikat	834 sertifikat	890 sertifikat	890 sertifikat	0 sertifikat	0 sertifikat	890 sertifikat	890 sertifikat	
		-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	
		-	Jumlah Calon Transmigran/ Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	500 KK	750 KK	1000 KK	1000 KK	120 KK	0 KK	1000 KK	1000 KK	
		-	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	-	-	1124 KK	1250 KK	-	KK	1124 KK	1250 KK	

Target Indikator Outcome Prioritas Daerah (RAKORTEKRENBANG)

No.	Indikator	Target Nasional 2026	Satuan Target	Target Daerah 2026	Jumlah Pagu Anggaran 2026	Bidang / UPTD Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	34,99	(%)	65	14.400.000.000	BID. HI Jamsos
2	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	15.389.510	Orang	28.658	-	BID. HI Jamsos
3	Jumlah Lulusan pelatihan Vokasi yang bersertifikat	283.168	Orang	2.092	166.747.290	Bid Latpenta dan UPTD BLK
4	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	38	Dokumen	1	-	BID Latpenta
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
1	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	45	(%)	9,09	24.976.600	BID Ketramigrasian

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator	Target Tahun					Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05	71,10	71,15	71,20	71,25	66,23% (93,22%)	72,62 (102,13%)	69,11 (97,13%)
2	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	20%	40%	60%	80%	100%	38,11%	38,11%	38,11%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	33%	46%	53%	66%	80%	40%	53%	53,22%
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	65%	70%	75%	80%	85%	78,13%	59,55%	86,80%
	Tingkat produktifitas tenaga kerja	76,75	77,00	77,25	77,50	77,75	83,4	81,59	82,38
	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40%	50%	60%	70%	80%	40%	86,10%	47,88%
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	60%	61%	62%	63%	64%	65%	50,60%	58,33%
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PILIHAN								
2	TRANSMINGRASI								
	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	40%
	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	60%	70%	80%	90%	100%	69%	75%	70%
	Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	0 KK	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	0%	0%	0 KK

Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

1. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 71,15 terealisasi sebesar 69,11 atau 97,13%.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan
Capaian Indikator Kinerja Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 60% terealisasi sebesar 38,11%.

Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

1. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja Tahun 2024 *tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 53% terealisasi sebesar 53,22%.
2. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Tahun 2024 *tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 75% terealisasi sebesar 86,80%.
3. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Tingkat produktifitas tenaga kerja Tahun 2024 *tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 77,25 terealisasi sebesar 82,38.
4. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 60% terealisasi sebesar 47,88%.
5. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 62% terealisasi sebesar 58,33%.
6. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Tahun 2024 *tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 90% terealisasi sebesar 100%.
7. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 60% terealisasi sebesar 40%.
8. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 80% terealisasi sebesar 70%.
9. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan Tahun 2024 *tidak tercapai* dari target yang telah ditetapkan, dari target 100 Kepala Keluarga terealisasi sebesar 0 Kepala Keluarga.

Faktor penyebab IKU dan IKK tidak tercapai

Adapun faktor penyebab IKU tahun 2024 tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2024 *tidak tercapai* (penurunan) karena ada beberapa sub indikator IPK mengalami penurunan seperti Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja yang paling tinggi penurunannya dan sub indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja serta Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan Tahun 2024 tidak mencapai target, dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang dialokasikan baik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Fasilitas Pembuatan Sertifikat Tanah Warga Transmigrasi oleh Badan Pertanahan Nasional.

Adapun faktor penyebab IKK tahun 2024 tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2024 *tidak tercapai*, dikarenakan jumlah Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.
2. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Tahun 2024 *tidak tercapai*, dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Tahun 2024 *tidak tercapai*, dikarenakan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar 241 Bidang Tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya. Serta tidak adanya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk penambahan penetapan kawasan transmigrasi.
4. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya Tahun 2024 *tidak tercapai*, dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang dialokasikan baik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan fasilitasi pembinaan warga transmigrasi.
5. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan Tahun 2024 *tidak tercapai*, dikarenakan tidak adanya penambahan warga transmigrasi yang ditempatkan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Pelayanan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara belum optimal didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, antara lain mengenai program yang ada di Kabupaten/Kota belum bersinergi dengan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu juga masih terbatasnya alokasi anggaran yang tertata dalam DPA pada Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat mengharapkan tambahan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagaimana yang tertata dalam alokasi APBD dan APBN pada setiap tahun guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD :

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.
- (5) Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah

- (1) Pelatihan Tenaga Kerja :
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi semakin meningkat;

- Pelatihan Kewirausahaan, dengan indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan semakin meningkat;
- (2) Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja :
 - Penempatan Tenaga Kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN dengan indikator kinerja besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan semakin meningkat;
- (3) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
 - Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator kinerja besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) semakin meningkat;
 - Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kepesertaan Jaminan Sosial serta Penegakan Hukum Terkait Kepesertaan Jamsostek dengan indikator kinerja besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif semakin meningkat.
- (4) Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan :
 - Pemeriksaan Perusahaan dengan indikator kinerja besaran Pemeriksaan Perusahaan semakin meningkat
 - Pengujian Peralatan di Perusahaan dengan indikator kinerja besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan semakin meningkat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

- (1) TANTANGAN
 - Terbatasnya Sumber Daya Aparatur.
 - Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
 - Masih minimnya alokasi anggaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pembiayaan melalui APBD.
 - Tingginya Migrasi tenaga kerja dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Utara.
 - Masih rendahnya tingkat Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - Pencari kerja masih memilih-milih lapangan pekerjaan pada sektor formal.
 - Porsi penduduk berusia lanjut yang bertambah akan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
 - Angka pengangguran masih relatif tinggi.
 - Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.
 - Pengangguran sukarela masih sering terjadi.
 - Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.

- Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
- Belum semua perusahaan mewajibkan pekerjanya mengikuti Program Jamsostek.
- Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.
- Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
- Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.
- Data ketenagakerjaan yang disampaikan dari Dinas Kabupaten/Kota kurang akurat dan bahkan ada yang tidak menyampaikan.
- Lahan lokasi pemukiman transmigrasi semakin terbatas.

(2) PELUANG

- Adanya pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan teknis fungsional.
- Adanya investasi yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.
- Adanya Balai Latihan Kerja yang menjadi tempat pelatihan bagi pencari kerja yang berbasis kompetensi dan masyarakat serta tersertifikasi dan diterima oleh pasar kerja.
- Kebijakan pasar kerja yang lentur.
- Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu penyelenggara MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
- Kota Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- UMP Provinsi Sulawesi Utara cukup relatif tinggi.
- Lowongan pekerjaan sektor informal masih cukup besar.
- Adanya pemetaan kesempatan kerja berdasarkan potensi dan keunggulan daerah.
- Adanya dialog yang efektif antara pengusaha dan pekerja, sehingga adanya iklim kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang harmonis.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

(1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan milik Pemerintah maupun Swasta;

- b) Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;
- c) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor;
- d) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan vokasi menggunakan kurikulum /modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri;
- e) Pelaksanaan uji kompetensi;
- f) Meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi.
- g) Reformasi Kelembagaan dan Revitalisasi Saran dan Prasarana Balai Latihan Kerja Bitung;
- h) Penyelenggaraan pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di perdesaan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- b) Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri;
- c) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- d) Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan;
- e) Penilaian Kinerja Perusahaan dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- f) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Jumlah peserta pemagangan dalam Negeri
- Jumlah LPK yang diakreditasi
- Jumlah tenaga kerja diperusahaan yang meningkat produktivitasnya;
- Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya.

(2) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri;
- b) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKA yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melalui sistem dan mekanisme kriteria yang ditetapkan dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui perluasan informasi dan transparansi kesempatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sistem rekrutmen dan penempatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- d) Peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat memberikan informasi efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Penempatan, melalui kegiatan:

- a) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja (Pameran Bursa Kerja);
- b) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI Prov. Sulut;
- c) Pemberdayaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Sarjana melalui Penugasan Pendampingan Masyarakat;
- d) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- f) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

- Jumlah Peserta Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI
- Jumlah tenaga kerja sarana yang melakukan pendampingan masyarakat
- Jumlah pendamping wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru)
- Tersedianya data pencaker dan lowongan kerja di Kab/Kota
- Jumlah perusahaan yang menerapkan analisis jabatan.

(3) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaa.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Peningkatan pelatihan bagi pelaku hubungan industrial mengenai teknik teknik negosiasi;
- b) Penyebarluasan hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan industrial;
- c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Perusahaan;
- d) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP/SB mengenai tata cara pembentukan LKS Bipartit;
- e) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
- f) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai pengupahan
- g) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan , jaminan sosial tenaga kerja , pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
- h) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial
- i) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- j) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial
- k) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melalui kegiatan :

- a) Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi unsur pengusaha dan pekerja;
- b) Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB;
- c) Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- d) Sosialisasi Pengupahan;
- e) Pemberdayaan Dewan Pengupahan;
- f) Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah;
- g) Sosialisasi Jaminan sosial;
- h) Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan HI;
- i) Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP;
- j) Bimtek Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan, pengupahan dan penyelesaian hubungan industrial, yang diukur melalui :

- Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi
- Jumlah pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan
- Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur
- Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan
- Jumlah anggota dewan pengupahan yang diberdayakan
- Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah
- Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS
- Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

(4) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS;

- b) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
- c) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- d) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial
- e) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan\anak ;
- b) Bimtek SMK3;
- c) Sosialisasi Kesehatan Kerja;
- d) Sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja;
- e) Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan;
- f) Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan;
- g) Pengujian Kualitas Lingkungan Kerja di Perusahaan;
- h) Peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
- i) Peningkatan SDM bidang K3 dan hygiene perusahaan.

Indikator Kinerja dari Program Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diukur melalui :

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan/anak
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan dan jamsostek
- Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan
- Jumlah perusahaan yang diuji kualitas lingkungan kerjanya
- Jumlah pekerja yang diperiksa derajat kesehatan kerjanya
- Jumlah pekerja yang dilatih K3 dan higiene perusahaan.

(5) Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
- b) Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi;
- c) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan melalui kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
- b) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan;
- c) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja dari Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang diukur melalui :

- Jumlah warga transmigrasi yang dilatih.
- Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi.
- Jumlah Kelembagaan Masyarakat PKK, KT, Karang Taruna yang Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terkait prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja berdasarkan Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan RKPD.

Adapun review terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2026

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.998.092.125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.247.912.212
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.380.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.325.128.999
01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manado, Bitung	150 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manado, Bitung	150 Dokumen	72.910.868
02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Manado, Bitung	113 pegawai	16.865.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Manado, Bitung	113 pegawai	14.200.105.130
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	410.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	18.870.898
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	9.129.171
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	24.112.932
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.434.198
01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	10.434.198
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				33.191.802
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113 pegawai	115.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113 pegawai	14.960.000
02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah	113 pegawai	30.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah	113 pegawai	0
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah	113 Pegawai	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113 Pegawai	18.231.802
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				310.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				392.080.479
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	135.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	108.878.792
03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	175.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	283.201.687
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				373.092.126	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.401.120.547
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	252.000.000
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	323.092.126	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	1.149.120.547
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423.390.122	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				304.774.128
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Manado	1 unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Manado	1 unit	66.831.167
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Manado dan Bitung	5 unit	43.390.122	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Manado dan Bitung	5 unit	132.106.261
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	68.950.000
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	36.886.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				261.609.877	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				773.289.875
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Manado	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Manado	1 Unit	550.000.000
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Manado dan Bitung	50 Unit	261.609.877	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Manado dan Bitung	50 Unit	223.289.875
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.892.184
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Manado	3 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Manado	3 dokumen	3.325.606

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	2.513.314	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	2.053.264	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					41.875.182	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					115.074.870
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					41.875.182	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					115.074.870
01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	41.875.182	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	115.074.870	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					415.693.206,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					231.071.826,00
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					365.000.000	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					188.146.138
01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 orang	365.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 orang	188.146.138	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					50.693.206	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					42.925.688
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 LPK	50.693.206	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 LPK	42.925.688	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					100.183.517	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					123.260.689
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					100.183.517	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					57.456.609
01	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Orang	100.183.517	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Orang	57.456.609	
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					0	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					34.978.915
01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500 Orang	0	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2600 Orang	34.978.915	
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					0	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					30.825.165
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	30.825.165	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					11.450.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					14.535.613.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					11.450.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					14.535.613.000
01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Keputusan Gubernur	450.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Keputusan Gubernur	135.613.000	
02	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605.325 orang	11.000.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605.325 orang	14.400.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					467.564.549	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					195.446.433
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					467.564.549	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					195.446.433
01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3750 perusahaan	210.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3750 perusahaan	27.081.132	
03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Perusahaan	257.564.549	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Perusahaan	168.365.301	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					9.583.357	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					56.457.364
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					0	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					0
01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					31.413.864
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					0	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					31.413.864
02	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1124 KK	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1124 KK	31.413.864	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					9.583.357	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					25.043.500
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					9.583.357	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					25.043.500
01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360 KK	9.583.357	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360 KK	25.043.500	
					31.482.991.936						32.504.836.394

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Masyarakat sangat menaruh perhatian terhadap berbagai program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, hubungan kerja maupun perlindungan tenaga kerja.

Program pelatihan kerja sebagai sarana untuk menjembatani dunia pendidikan formal dengan dunia kerja yang menjadi tumpuan masyarakat. Pasar kerja dimana pencari kerja lebih banyak dari pada kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pemberi kerja mempunyai keleluasaan mendapatkan calon tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Oleh karena itu pencari kerja akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dan diharapkan pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kualitas pencari kerja seperti yang diinginkan pemberi kerja.

Fasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan penempatan tenaga kerja bagi masyarakat masih sangat terbatas. Di satu sisi, sebagian masyarakat menghadapi kendala dalam mengakses informasi pasar kerja. Akibat ketidaktersediaan informasi pasar kerja, maka sebagian dari mereka masuk ke pasar kerja di suatu daerah tanpa informasi dan pengetahuan sehingga akhirnya menjadi beban bagi daerah. Pembangunan pusat-pusat informasi pasar kerja yang mudah dijangkau sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat. Pengembangan informasi pasar kerja melalui internet sangat dibutuhkan dan membantu, disarankan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu adanya informasi pasar kerja secara online yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat memfasilitasi penyebaran informasi pasar kerja serta penyelenggaraan bursa kerja di daerah Kabupaten/Kota.

Berbagai program penempatan baik penempatan dalam negeri maupun luar negeri hendaknya tersedia dan tersebar di berbagai daerah. Tingginya upah yang ditawarkan di luar negeri dan belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya, menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Kondisi sekarang ini banyak pencari kerja yang menempuh mekanisme non-prosedural, sehingga harus mengeluarkan banyak biaya dalam upaya untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Di sisi lain, masih sering dijumpai kasus-kasus hukum yang menimpa TKI di luar negeri. Melalui reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah berusaha menghilangkan segala hambatan tersebut.

Keluhan masyarakat pekerja yang umum didengar adalah rasa ketidakadilan dan ketidak-pastian dalam hubungan kerja. Berbagai praktek hubungan kerja dirasakan sangat merugikan pekerja, seperti masalah hubungan kerja dan pengupahan. Pola rekrutmen kontrak dan dipekerjakan dalam status *outsourcing* menjadi pola yang masih banyak diterapkan dalam dunia kerja saat ini.

Atas dasar berbagai persoalan tersebut masyarakat pekerja mengharapkan peran bersama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja dapat mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi situasi demikian yang dapat memberikan ketenangan bagi pekerja dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas.

Dalam berbagai forum telah banyak tuntutan untuk mereformasi berbagai regulasi, seperti UU 13/2003 dan UU 39/2004. Masyarakat menganggap undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan oleh karenanya perlu diamandemen. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) masyarakat memandang permasalahan mengenai pengupahan, PHK dan kompensasinya, dan masalah *outsourcing* dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika ekonomi.

Penegakan peraturan ketenagakerjaan atas norma kerja perlu ditingkatkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan secara terus menerus sehingga tercapai perbandingan ideal antara jumlah pengawas dengan perusahaan. Masyarakat mengharapkan agar melalui pengawasan dan penegakan hukum di setiap perusahaan akan dapat meningkatkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

Iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian investasi dapat berkembang dan diharapkan pula semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Selanjutnya berdasarkan Hasil Pra Musrembang tahun 2026 dengan Kabupaten/Kota terdapat usulan untuk Tahun 2026, serta usulan Pokok Pikiran Dewan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Urusan Ketenagakerjaan					
1	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan : Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kel. Manembo-nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 10.000.000,-	Masyarakat Memohon Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara Bersama Pemerintah Kota Bitung Agar Kiranya Dapat Memberikan Kejelasan Terkait Kontrak Kerja Dan Hak Karyawan Beserta Aturan Perusahaan di PT Kutai Kota Bitung (Pokir Anggota DPRD; Julitje M. Marinka, SE)
2	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan : Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kel. Manembo-nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 10.000.000,-	Masyarakat mengharapkan perhatian Pemerintah Provinsi terkait Hak-hak pekerja yang belum dibayar dari Perum Bitung. (Pokir Anggota DPRD; Eugenie N. Mantiri, S.Pd, MAP)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Bidang Ketenagakerjaan

Kebijakan nasional bidang ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja baik melalui kebijakan lintas sektor yang mendorong masing-masing sektor dalam menciptakan peluang kerja, maupun berbagai program pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang memiliki populasi sumberdaya manusia terbesar, tetapi dengan kualitas ketrampilan yang rendah. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran. Walaupun demikian, jumlah sumberdaya manusia yang besar ini harus diakui merupakan potensi besar yang harus dikelola dengan optimal yang merupakan salah satu alternatif solusi penting bagi proses percepatan pemulihan ekonomi. Demikian juga pasar tenaga kerja luar negeri merupakan tantangan dan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah memberikan kontribusinya dalam mendukung dan memajukan Indonesia melalui remitansi yang menambah devisa negara. Krisis ekonomi dunia yang membuat berbagai negara harus mereformasi perekonomiannya ternyata tidak memberi pengaruh besar bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan mulai bangkitnya perekonomian dunia, tenaga kerja Indonesia dapat mengambil manfaat dari berbagai kesempatan yang ada.

Potensi lain yang dapat memajukan sektor ketenagakerjaan di daerah adalah dari kemajuan perekonomian daerah dengan pertumbuhan yang menggembirakan. Berbagai faktor telah dikembangkan yang memberikan dorongan untuk kemajuan yang lebih besar antara lain dimana pemerintah melakukan reformasi dan revitalisasi berbagai infrastruktur ketenagakerjaan seperti regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha. Demikian juga dengan infrastruktur peningkatan kualitas dan penempatan tenaga kerja. Sarana pelatihan telah dibangun dan direvitalisasi, dan saat ini telah berfungsi.

Keberadaan Balai Latihan Kerja Bitung, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kualitas, masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang berbasis kompetensi. Dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, telah dikembangkan Program *Three in One* yang meliputi pelatihan kerja, sertifikasi dan penempatan. Di Balai Latihan Kerja Bitung

dibentuk kios *Three in One* dalam upaya meningkatkan kesesuaian antara luaran pelatihan kerja dengan dunia usaha.

Disamping hal tersebut untuk menanggulangi masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan berbagai kegiatan melalui Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) melalui kegiatan padat karya produktif, pemberdayaan teknologi tepat guna, wirausaha baru, penempatan tenaga kerja melalui subsidi program, pendampingan usaha mandiri, penempatan tenaga kerja melalui *job fair* dan bursa kerja yang informasinya dapat langsung diakses melalui bursa kerja *online*, serta penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Gejolak unjuk rasa/pemogokan dan penyelesaian masalah hubungan industrial yang berlarut-larut (PHK dan tuntutan upah) masih menjadi agenda penting. Berbagai tuntutan yang diajukan, utamanya terkait dengan aspek rekrutmen yang dikenal dengan sistem *outsourcing* dan sistem pengupahan. Di beberapa daerah Kabupaten/Kota sarana hubungan industrial belum terbentuk sepenuhnya dan terbatasnya tenaga pengawas ketenagakerjaan, bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Kondisi ini mempunyai potensi menurunkan ketenangan berusaha dan bekerja, yang lebih jauh berdampak pada menurunnya kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja maupun perusahaan.

b. Bidang Ketransmigrasian

Menghadapi besarnya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu sebab besarnya jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan, maka pembangunan transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan perdesaan sebagai *hinterland* dengan kawasan perkotaan, sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Dengan disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka transmigrasi akan lebih jelas perannya dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut disebabkan karena berubahnya pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, semakin besarnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan transmigrasi, serta diwajibkannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha untuk mengembangkan investasi di Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan perubahan UU tersebut, maka peran transmigrasi dalam RPJM Nasional tahun 2017-2021 maupun dalam RPJMD Tahun 2016-2021 semakin jelas dan terukur, yaitu mendukung Prioritas Bidang

Wilayah dan Tata Ruang dalam pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Pembangunan bidang ketransmigrasian selain menjadi alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional/daerah dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional/daerah, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk mendukung program tersebut di atas, terdapat sejumlah kawasan transmigrasi yang potensial untuk direvitalisasi dan kawasan baru yang potensial dikembangkan untuk mempercepat tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Sejak diimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang cukup signifikan. Sementara itu, pembangunan perdesaan terutama di daerah tertinggal, yang selama ini cenderung mengabaikan potensi sinergi dengan kawasan perkotaan dalam suatu konsep pengembangan wilayah dapat mengakibatkan hasil pembangunan perdesaan justru tersedot ke perkotaan baik dari sisi sumberdaya manusia, alam, bahkan modal. Kondisi kawasan perdesaan tersebut pada umumnya memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar, namun belum didukung dengan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memadai sehingga merupakan peluang cukup besar untuk pengembangan program-program ketransmigrasian.

Memperhatikan berbagai potensi dan peluang tersebut, maka pembangunan transmigrasi berbasis kawasan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pada dasarnya merupakan peluang yang cukup besar bagi badan usaha untuk berinvestasi dan terintegrasi dengan pembangunan kawasan transmigrasi, yang perlu didukung sumberdaya masyarakat transmigrasi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

a. TUJUAN

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk mencapai tujuan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara, sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara, maka berikut tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 :

3. Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
4. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera;
5. Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif;
6. Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Industrial yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
7. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional; dan
8. Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

b. SASARAN

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

10. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Perusahaan;
11. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;
13. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki suasana kerja agar lebih kondusif;
14. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
15. Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

- 1. Jumlah Program sebanyak 8 (delapan) program, jumlah Kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 32 (tiga puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :**

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- b. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- c. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi :
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja :
 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja.
- d. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Job Fair/Bursa Kerja.
 2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 3. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- e. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) :
 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); dan
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
- f. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan :
 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan; dan
 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.
- g. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
 - Penyuluhan Transmigrasi.
- h. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan:
 - Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Adapun penyebaran program dan kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2026 terlampir dalam **Tabel TC.33.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Sulawesi Utara memperhatikan konsistensi arah pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 serta Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan dan urusan wajib non pelayanan dasar di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, serta dengan memperhatikan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045, yaitu **"Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik yang mandiri, Maju dan Berkelanjutan"**. Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 adalah **"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Towards Advanced, Prosperous, and Sustainable North Sulawesi)"**. Serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendukung Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang difokuskan pada **"Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang didukung Regulasi Tata Ruang dan Inovasi"** menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu pada Program-program :

- Program Ke-1 (satu) yaitu "Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia",
- Program Ke-3 (tiga) yaitu "Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial",
- Program Ke-4 (empat) yaitu "Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan
- Program Ke-8 (delapan) yaitu "Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah".

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta sumber-sumber pendanaan lainnya)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan Rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 serta dapat membawa pengaruh positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan adanya ketersediaan alokasi anggaran APBD sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Upaya tersebut tentunya harus didukung oleh komitmen dari seluruh jajaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten/Kota, serta *stakeholder* yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja dan Pendanaan Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 dijabarkan pada tabel-tabel yang terdapat dalam lampiran Renja ini.

Manado, Oktober 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001

TABEL TC.33

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD) TAHUN 2026**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						30.641.297.705,00							30.892.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.584.840.341,00							30.837.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						30.584.840.341,00							30.837.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	-			100 %	15.737.713.692,00						-	15.457.000.000,00	
		[Meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran]	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	100	100	100	100	15.737.713.692,00	-	-	-	-	-	-	15.457.000.000,00	-
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			100 %	7.892.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.325.606,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.513.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.053.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	14.251.472.429,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	14.629.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/ Bulan	14.200.105.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		14.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.412.661,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	2.769.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.488.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.696.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			100 %	18.231.802,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				113 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	18.231.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	-			100 %	308.509.745,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	270.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	57.563.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	250.946.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	-			100 %	580.359.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	30.359.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata <i>Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut</i>	-			100 %	377.160.665,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	66.831.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	54.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-			30 Orang	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	-			900 Orang	57.456.609,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningka tan Kualitas Pendidikan dan Penge mbangan S umberdaya Manusia	Masyarakat	-	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				850 Orang	57.456.609,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningka tan Kualitas Pendidikan dan Penge mbangan S umberdaya Manusia	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-			16 Orang	34.978.915,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningka tan Kualitas Pendidikan dan Penge mbangan S umberdaya Manusia	Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				16 Orang	34.978.915,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningka tan Kualitas Pendidikan dan Penge mbangan S umberdaya Manusia	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	30.825.165,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				10 Orang	30.825.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	-			175840 Orang	14.535.613.000,00						-	15.105.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-			3 Kegiatan	73.178.090,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	-	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				423 Perusahaan	73.178.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						56.457.364,00							55.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						56.457.364,00							55.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	-			2 %	31.413.864,00						-	25.000.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi]	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	6	0	2	2	31.413.864,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang mendapatkan Program Penempatan	-			1 lokasi	31.413.864,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i>				100 Kepala Keluarga	31.413.864,00	Kab. Minahasa Utara, Likupang Barat, Serei Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Wioi Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan</i>	-			13 %	25.043.500,00						-	30.000.000,00	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi]	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	31	4	4	13	25.043.500,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	<i>Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya</i>	-			4 Pemukiman	25.043.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>				40 Kepala Keluarga	25.043.500,00	Kab. Minahasa Selatan, Tompaso Baru, Liandok Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Wioi Timur Kab. Bolaang Mongondow Timur, Tutuyan, Tutuyan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H							30.641.297.705,00							30.892.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA						1.109.883.107,00							1.138.503.267,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.109.883.107,00							1.138.503.267,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.109.883.107,00							1.138.503.267,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	878.811.281,00						-	917.952.977,00	
		[Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran]	-	-	-	-	-	878.811.281,00	-	-	-	-	-	-	917.952.977,00	-
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			96 %	29.576.053,00			-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	34.792.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	17.302.263,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		20.929.700,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	7.346.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		9.015.300,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.647.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		2.041.100,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.279.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		2.805.900,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tercatat	-			100 %	3.673.188,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.353.750,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	3.673.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		3.353.750,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			100 %	14.960.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	0,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	14.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	-			100 %	45.005.617,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	35.857.860,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	12.750.160,00	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		12.750.160,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	32.255.457,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		23.107.700,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	-			100 %	92.240.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	129.550.180,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	92.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		129.550.180,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	-			99 %	633.740.162,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	642.256.064,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		84.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	549.740.162,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-		558.256.064,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	-			100 %	59.616.261,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	-	-	72.143.123,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Persentase Penyerapan Lulusan</i>	-			80 %	188.146.138,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	166.747.290,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n</i>				48 Orang	188.146.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Masyarakat		166.747.290,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	-			60 %	42.925.688,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningka tan Kualitas Pendidikan dan Penge mbangan S umberdaya Manusia	Lembaga Pelatihan Kerja	-	53.803.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				5 LPK	42.925.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningka tan Kualitas Pendidikan dan Penge mbangan S umberdaya Manusia	Lembaga Pelatihan Kerja		53.803.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
	JUMLAH							1.109.883.107,00							1.138.503.267,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA						753.655.582,00							775.160.582,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						753.655.582,00							775.160.582,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						753.655.582,00							775.160.582,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	-			100 %	631.387.239,00						-	652.892.239,00	
		[Meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran]	-	-	-	-	-	631.387.239,00	-	-	-	-	-	-	652.892.239,00	-
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	44.080.517,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	44.080.517,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	14.195.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		14.195.944,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	8.754.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		8.754.618,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.993.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		3.993.095,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	17.136.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		17.136.860,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tercatat	-			100 %	6.761.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	6.761.010,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.761.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		6.761.010,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	21.505.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		21.505.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase kehadiran dalam acara yang diundang</i>	-			100 %	38.565.117,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	38.565.117,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	38.565.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		38.565.117,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	-			100 %	100.690.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	100.690.875,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	100.690.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		100.690.875,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata <i>Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut</i>	-			100 %	390.219.720,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	390.219.720,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		48.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	342.219.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		342.219.720,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	-			100 %	51.070.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	51.070.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	33.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		33.930.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		17.140.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
		-	-	-	-	-	-	631.387.239,00	-	-	-	-	-	-	652.892.239,00	-
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perangkat Daerah		0,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-hak Dasarnya	-			32450 Orang	122.268.343,00						-	122.268.343,00	
		[Terlindunginya Hak-Hak Pekerja]	-	-	-	-	-	122.268.343,00	-	-	-	-	-	-	122.268.343,00	-
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-			3 Kegiatan	122.268.343,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan	-	122.268.343,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				54 Perusahaan	27.081.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan		27.081.132,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				250 Perusahaan	95.187.211,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Perusahaan		95.187.211,00	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
	J U M L A H							753.655.582,00							775.160.582,00	